

Efektivitas Model Pendidikan Politik Dalam Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu di Kabupaten Deli Serdang

Yusriati¹ & Dedi Amrizal²

*Corresponding Email: yusriati@umsu.ac.id & dediamrizal@umsu.ac.id

RINGKASAN - Aktivitas sosialisasi digunakan untuk penanggulangan golput oleh KPUD Deli Serdang. Sosialisasi menjadi sarana utama pendidikan politik yang dipakai untuk keberhasilan pemilihan umum di Deli Serdang. Peran Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai pelaku utama pendidikan politik yang handal ternyata belum digunakan secara maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui efektivitas pendidikan politik yang dilakukan oleh KPUD Deli Serdang; 2) untuk mengetahui apakah sosialisasi pemilu merupakan sarana yang tepat dalam melakukan pendidikan politik di Deli Serdang; 3) untuk membuktikan model pendidikan politik yang paling tepat dalam pemilihan umum di Deli Serdang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus untuk membuktikan efektivitas penggunaan model pendidikan politik selama ini melalui sosialisasi pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pendidikan politik melalui sosialisasi pemilu semata ternyata kurang mendapat manfaat jika tidak dibarengi dengan aktivitas pencerahan dan pembinaan tokoh masyarakat dan ormas pada kegiatan-kegiatan pemilu dari KPU Deli Serdang. Selain itu, ditemukan bahwa implementasi model pendidikan pemilu dilakukan melalui program rumah pintar pemilu belum maksimal diberdayakan. Dapat disimpulkan bahwa model pendidikan politik yang dilakukan melalui sosialisasi harus dikembangkan dengan kegiatan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat langsung dengan issue-issue sentral yang dekat dengan mereka.

Kata Kunci: *Pendidikan Politik, Sosialisasi, Pemilu.*

¹ Dosen Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

² Dosen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

PENDAHULUAN

Sosialisasi politik sebagai komponen utama pada suatu sistem politik bertujuan untuk membuat setiap individu mampu mempelajari politik secara sadar maupun tidak sadar. Hal ini berarti sosialisasi politik dapat digunakan untuk menjadi alat dalam melakukan pendidikan politik kepada pemilih.

Namun yang menjadi masalah adalah jika sebuah model pendidikan politik hanya berisi kegiatan sosialisasi politik saja. Padahal diketahui bahwa dalam setiap pendidikan politik, model ini hanya sebagai bentuk selebrasi pemilu atau pilkada bukan substansi dari pemilu atau pilkada itu sendiri. Oleh karena itu, kemampuan memilih wakil rakyat atau pemimpin yang amanah adalah hal yang utama dibandingkan dengan kesalahan dalam proses pencoblosan ataupun perhitungan. Pada model pendidikan politik yang hanya menyertakan sosialisasi sebagai faktor utamanya, terlihat bahwa kita masih disibukkan dengan faktor pendukung dibandingkan dengan faktor utama pilkada dan pemilu itu sendiri.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa sosialisasi pemilu masih menjadi sarana utama dalam melakukan pendidikan politik sebelum pemilu atau pilkada dilakukan oleh KPU Deli Serdang. Model pendidikan politik dengan hanya mengandalkan sosialisasi pemilu akan menjadi tidak efektif bila tidak melibatkan tokoh masyarakat dan simpul massa serta issue-issue sentral pada saat pemilu atau pilkada berlangsung.

Tiga tahun penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pendidikan politik yang khusus dan terfokus belum ada. Pendidikan politik yang memiliki program seperti sebuah model memang belum pernah dilakukan dengan serius. Penyadaran politik singkat dilakukan melalui sosialisasi dan tergantung pada masa pelaksanaan pemilu. Untuk pendidikan politik terprogram memang sudah ada dilakukan melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP) namun terganggu oleh keterbatasan personel, dana dan fasilitas.

Bila dilihat dari peningkatan jumlah pemilih selama pilkada serentak dengan pemilu terakhir, terlihat aktivitas sosialisasi yang dilakukan selama ini cukup untuk menjadi alasan tidak perlunya pendidikan politik secara massif dimasa depan. Hal ini disebabkan meningkatnya partisipasi pemilih dalam setiap kali digelar pemilu atau pilkada.

Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah 1) apakah pendidikan politik yang dilakukan oleh KPUD Deli Serdang selama ini berlangsung dengan efektif?; 2) bagaimanakah bentuk sosialisasi pemilu yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pendidikan politik di Deli Serdang sudah berjalan dengan tepat?; 3) Apakah model pendidikan politik dalam pemilihan umum di Deli Serdang selama ini sudah ada?.

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui efektivitas pendidikan politik yang dilakukan oleh KPUD Deli Serdang; 2) untuk mengetahui apakah sosialisasi pemilu merupakan sarana yang tepat dalam melakukan pendidikan politik di Deli Serdang; 3) untuk membuktikan model pendidikan politik yang paling tepat dalam pemilihan umum di Deli Serdang.

Penelitian ini selama dua tahun menunjukkan pendidikan politik hanya dilakukan melalui sosialisasi pemilu, sedangkan program RPP belum berperan dalam pendidikan politik. Pada tahun ketiga RPP telah memiliki personal dan program yang jelas, namun dalam pelaksanaannya masih bersifat sosialisasi pemilu. Model pendidikan politik yang seharusnya ada dan berjalan, ternyata belum terlihat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah informasi tentang penerapan pendidikan politik dalam pemilu atau pilkada serta model pendidikan politik yang pernah dilakukan selama ini. Selain itu, dibutuhkan juga informasi dari Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang dan RPP dalam menerapkan pendidikan politik dan model pendidikan politik. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pendidikan politik pada dasarnya ingin membuktikan peran dominan dari sosialisasi yang telah dilakukan selama ini, kemudian dibentuklah RPP untuk menjalankan pendidikan politik namun belum mampu untuk menjalankan pendidikan politik dengan sempurna dan belum memiliki model yang tepat dalam setiap kali pemilu atau pilkada dilakukan. Padahal pendidikan politik itu sejatinya diberikan dan dilakukan oleh RPP dan KPUD diluar agenda kegiatan pemilu atau pilkada.

Berikut ini adalah beberapa hal penting terkait penerapan pendidikan politik guna meningkatkan partisipasi penduduk di Kabupaten Deli Serdang:

1. Efektivitas Pendidikan Politik

Pendidikan politik menurut Alfian (2011) adalah upaya sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik ideal yang akan dibangun. Sejalan dengan itu, Kartono (1996) lebih jauh menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar dapat menjadi peserta yang bertanggung jawab secara etis dan moral dalam mencapai tujuan politik. Jadi, upaya sadar dari mulai bentuk sosialisasi politik sampai kepada upaya pendidikan yang lebih sistematis agar masyarakat bertanggung jawab secara moral dan etis dalam setiap kegiatan pemilu menjadi bagian penting dari aktivitas yang harus dilakukan oleh KPU Deli Serdang. Sejauh ini telah terlihat upaya pendidikan politik tersebut namun baru dalam bentuk sosialisasi pemilu dan mendirikan RPP.

Pendidikan politik tidak bisa disamakan dengan sosialisasi pemilu. Namun ada bagian penting kegiatan sosialisasi pemilu yang dapat digolongkan aktivitas pendidikan politik seperti mengingatkan pentingnya pemilu, tahapan pemilu, tanggal pemilu dan simulasi pemilu melalui kegiatan berbentuk: diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, pelatihan, ceramah, simulasi, dan kegiatan lainnya yang menggunakan metode tatap muka lainnya.

Sampai saat ini, sudah menjadi anggapan umum bahwa kegiatan penting yang memiliki pengaruh langsung pada tingkat partisipasi pemilih adalah proses sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang. Sosialisasi adalah program utama dalam serangkaian kegiatan pemilihan umum. Sosialisasi pemilu telah menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Informasi Publik dan Partisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 1 angka 10 menjelaskan bahwa sosialisasi implementasi pemilu, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilu. Sosialisasi pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilu.

Tujuan sosialisasi pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 pasal 3, yaitu: a) menyebarluaskan informasi tentang tahapan, jadwal dan program Pemilu; b) meningkatkan pengetahuan publik, pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam pemilihan; dan c) meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.

Dalam peraturan tersebut disebutkan tentang adanya upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran pemilih akan hak dan kewajibannya. Yang menjadi permasalahan selama ini adalah sosialisasi bersifat temporer dan tidak memiliki model pendidikan politik yang baku dan mapan sebagai bentuk aktivitas yang berkerja tanpa melihat ada tidaknya pemilu atau pilkada.

Bila selama ini terdengar pendapat yang mengatakan keberhasilan sosialisasi akan membuat partisipasi pemilih meningkat, ternyata tidak selamanya benar. Hal ini disebabkan faktor penentu peningkatan pemilih terdiri dari faktor temporer dan faktor yang bertahan lama. Faktor temporer adalah faktor yang mudah berubah dan tidak tetap seperti sosialisasi pemilu, issue politik, perkembangan politik, perubahan aturan pemilu, dan lain-lain. Sedangkan faktor yang bertahan lama adalah pendidikan politik yang diberikan melalui upaya penyadaran individu pemilih dari waktu ke waktu tanpa ada momen pemilu atau pilkada.

Pendidikan politik yang efektif belum diupayakan dengan sungguh-sungguh mengingat sosialisasi pemilu masih dianggap sebagai upaya penting dan utama dalam meningkatkan jumlah pemilih. RPP yang telah berdiri dan memiliki program kerja ternyata terkendala dengan kurangnya dana, kemampuan sdm yang belum terlatih dan tidak adanya model pendidikan politik terapan.

2. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu

Pada dasarnya sosialisasi pemilu merupakan proses belajar politik bagi warga negara agar memahami dan memiliki kesadaran akan peran untuk bertindak dengan tepat di masyarakat dalam bidang politik. Sejalan dengan itu, Djuyandi dalam Amrizal (2018) mengungkapkan bahwa sosialisasi umumnya dipahami sebagai proses pembelajaran. Kondisi ini terjadi karena pada dasarnya orang tidak

akan pernah puas untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahui, seperti belajar tentang peran, norma dan nilai-nilai untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial.

Aktivitas sosialisasi pemilu merupakan bagian dari sosialisasi formal. Menurut Syarbaini dalam Amrizal (2018) bahwa sosialisasi formal merupakan bentuk sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga berwenang sesuai peraturan negara atau melalui lembaga yang dibentuk sesuai dengan hukum yang berlaku dan peraturan pemerintah.

Selama ini sosialisasi pemilu menjadi aktivitas utama KPU dan RPP di setiap pemilu ataupun pilkada. Sosialisasi ini diharapkan untuk menaikkan angka partisipasi politik. Maran (2001) menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah upaya terorganisir oleh warga untuk memilih pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan arah kebijakan publik. Upaya ini didasarkan pada kesadaran akan tanggung jawab mereka untuk hidup bersama sebagai bangsa di suatu negara. Sejalan dengan itu, Budiarmo (2008) menegaskan bahwa partisipasi politik adalah aktivitas seseorang atau kelompok untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik, seperti dengan memilih pemimpin negara dan secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Berarti sosialisasi pemilu membutuhkan partisipasi aktif warga dalam kehidupan politiknya seperti memilih pemimpin (temporer) dan mempengaruhi kebijakan (setiap waktu). Sosialisasi pemilu sebagai bagian dari pendidikan politik tidak hanya bicara aktivitas temporer saja tapi harus sudah membicarakan aktivitas yang berlangsung setiap waktu.

Sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang meliputi: a) kerjasama PPK dan PPS dengan penduduk dan sipil; b) membuat papan iklan, spanduk, flayers, media sosial sebagai bentuk penyebaran informasi pemilihan umum kepada masyarakat secara keseluruhan; c) sosialisasi dan simulasi ke SMA sederajat; d) pengumpulan data tentang persyaratan pemilihan di desa atau kecamatan; e) mengundang masyarakat dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang. Semua kegiatan dilakukan dengan lancar dan sesuai rencana sehingga memberikan dampak yang besar bagi peningkatan jumlah pemilih dalam kegiatan pilkada dan pemilu terakhir.

Pada penelitian ini penerapan sosialisasi pemilu yang dilakukan pada saat pemilu atau pilkada telah berjalan dengan baik. Namun ini perlu ditingkatkan kepada bentuk pendidikan politik yang lebih luas melalui keterlibatan RPP.

3. Model pendidikan politik di Deli Serdang

Pendidikan politik melalui RPP telah tergambar dalam program kerja yang ada, namun belum terwujudkan seluruhnya. Aktivitas sosialisasi masih mendominasi program kerja RPP karena masih berbarangan kerjanya dengan aktivitas sosialisasi pemilu oleh KPU Deli Serdang. Pembuatan model pendidikan politik yang menjadi panduan kegiatan politik sudah terpikirkan oleh mereka namun belum sempat untuk mewujudkannya ditengah kendala sdm dan dana.

Model pendidikan politik selama ini hanya berisikan aktivitas sosialisasi pemilu bersama KPU Deli Serdang. Sedangkan model pendidikan politik yang baik menurut penelitian yang dilakukan harus memperhatikan beberapa hal seperti: 1) memiliki kantor yang langsung berada di tengah masyarakat; 2) memiliki aktivitas rutin tak terikat pemilu/pilkada di tengah masyarakat; 3) melibatkan unsur tokoh masyarakat, agama dan suku; 4) melakukan pertemuan langsung ke simpul masyarakat melalui tatap muka dan aktivitas sosialisasi yang telah dilaksanakan selama ini.

Model ini dapat dibentuk dari memperhatikan kinerja KPUD, RPP dan penerapan sosialisasi pemilu yang telah dilakukan selama ini. Model pendidikan politik ini membutuhkan pengujian dan penerapan kembali di masa yang akan datang untuk membuktikan kegunaan sebuah produk.

SIMPULAN

Pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU Deli Serdang melalui sosialisasi pemilu juga menggunakan program RPP. Efektifitas pendidikan politik yang dilakukan hanya berlangsung pada saat pemilu/ pilkada dilakukan. Padahal pelaksanaan pendidikan politik harus berjalan sepanjang waktu dan tidak tergantung pada saat mau pemilu atau pilkada saja seperti sosialisasi pemilu.

Sejalan dengan itu, maka dapatlah kita kemukakan bahwa sosialisasi pemilu bisa dikatakan berisi kegiatan pendidikan politik, namun tidak bisa dikatakan bahwa pendidikan politik dapat dilakukan hanya dengan sosialisasi pemilu atau pilkada. Pendidikan politik yang tepat harus dilakukan oleh lembaga

tertentu seperti RPP dan memiliki model yang jelas dengan program kerja yang terukur dan cukup dana dan SDM.

Penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan bahwa model pendidikan politik yang dipakai oleh KPU Deli Serdang melalui RPP nya belum ada sama sekali. Adapun model yang terbangun selama ini terkait sosialisasi politik yang ada di Deli Serdang hanya berisi aktivitas sosialisasi pemilu saja. Harus dibangun model pendidikan politik yang lebih luas dan melibatkan unsur masyarakat.

Model pendidikan politik yang dapat dihasilkan dari penelitian ini sebaiknya memiliki kantor di tengah masyarakat dengan aktivitas rutin tak terikat pemilu/pilkada melalui bantuan tokoh masyarakat, agama dan suku disetiap pertemuan tatap mukanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. (2011). *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Amrizal, Dedi Ahmad Hidayah Dalimunthe, dan Yusriati. (2018). *Penanggulangan Golput Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada*. Medan: Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Amrizal, Dedi, Yusriati, dan Hermansyah Lubis. (2018). *“The Role of General Election Commission (KPU) in Increasing Voters’ Participation in Langkat, Medan, Indonesia”*, BIRCI-Journal: Humanities and Social Sciences, e-ISSN: 2615-3076, p-ISSN: 2615-1715, Volume I, No 2, June e 2018 pp. 16.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kartono, Kartini. (1996). *Pendidikan Politik*. Bandung: Mandar Maju.
- Komisi Pemilihan Umum. (2015). Peraturan KPU No. 5 tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Maran, (2001). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.